

ABSTRAK

HUBUNGAN KEMAMPUAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SISWA DI SEKOLAH DENGAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG

Oleh

(Novita Hariyani, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan adakah hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian korelasional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 orang. Analisis data menggunakan Chi Kuadrat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah (X) dominan pada kategori sedang atau cukup mampu dengan persentase 66,67%, (2) tingkat pelanggaran tata tertib (Y) dominan pada kategori ringan dengan persentase 47,62%, (3) hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif, signifikan, dan kategori keeratan tinggi antara kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib, artinya semakin tinggi kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah maka semakin rendah pula tingkat pelanggaran tata tertib.

KATA KUNCI: *Mengemukakan Pendapat, Hak dan Kewajiban Siswa, Pelanggaran Tata Tertib*

ABSTRACT**CORRELATION OF ABILITY OPINION SUGGESTED ABOUT RIGHT AND DUTY OF STUDENT IN THE SCHOOL WITH VIOLATION OF A RULE IN JUNIOR HIGHT SCHOOL 20 BANDAR LAMPUNG ON 2012/2013****By****(Novita Hariyani, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)**

The aims of this research was to explain the correlation of ability opinion suggested about right and duty of student in the school with violation of a rule in Junior high School 20 Bandar Lampung on 2012/2013. Method used correlational research. Sample was 21 persons. Data analyses used Chi Quadrate.

Research result showed that: (1) correlation of ability opinion suggested about right and duty of student in the school (X) dominant on able enough category or 66,67%, (2) violation of a rule (Y) dominant on light category or 47,62%, (3) research result showed that there was positive, significant correlation and high bounded between correlation of ability opinion suggested about right and duty of student in the school with violation of a rule it means that if ability opinion suggested about right and duty of student in the school was more able, so violation of a rule of student was light.

Key Words: *Opinion Suggested, Right and Duty of Student, Violation of A Rule*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara kita Indonesia sejak dua tahun belakangan ini banyak dihembusi oleh angin demokrasi yang dipadatkan dalam bentuk berbagai keinginan dan tuntutan dengan mengatasnamakan rakyat. Keinginan untuk mengedepankan sifat keterbukaan dalam berbagai isu nasional agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan bisa memonitor dan mengontrol secara langsung semua kebijakan yang dilakukan pemerintah. Keinginan untuk mengeluarkan pendapat secara lebih bebas. Keinginan untuk mendapatkan otonomi lebih besar dalam pengelolaan daerah. Semua ini dilapis dalam kata demokrasi, suara yang berasal dari rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan membuka cara berpikir setiap insan terhadap hidup yang berbudaya, kecanggihan teknologi, konsep kesamaan dalam perbedaan, persamaan hak dan kewajiban, dan harapan dalam hidup. Tingkat pendidikan yang lebih baik telah menggantikan sikap patuh dan diam dengan sikap kritis dan aktif. Inilah yang membangkitkan semangat reformasi untuk berdemokrasi di kalangan masyarakat khususnya generasi muda, yaitu salah satunya kaum pelajar terutama dalam kemampuannya mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajibannya di sekolah.

Yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan dari sistem pendidikan yang ada adalah pembenahan dalam cara mengajar. Cara mengajar yang hanya dititikberatkan pada penyampaian materi pelajaran (satu arah) harus dirubah dengan cara mengajar yang mengajak siswa untuk berpikir (dua arah). Berpikir secara mandiri dan bersama-sama dengan siswa lain dan guru sebagai satu kelompok. Berpikir dan mengemukakan hasil pemikirannya dalam bentuk pendapat kepada siswa lain dan guru. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk cara belajar yang interaktif.

Salah satu mata pelajaran di sekolah yang sangat menekankan pada kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat materi yang khusus menjelaskan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat, jadi di dalam materi ini siswa dituntut memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat, salah satunya kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Harapannya siswa tidak hanya mampu dalam mengemukakan pendapatnya, tetapi mampu juga dalam mengaplikasikan hak dan kewajibannya di sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan atau kualitas guru, karena guru memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku siswa. Pembinaan oleh guru di sekolah merupakan bagian integral dari upaya pembinaan kesadaran hukum atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pembinaan terhadap tata tertib sekolah merupakan salah satu bentuk kegiatan

guru di sekolah dalam rangka pembinaan generasi muda dan pembentukan manusia disiplin dan terdidik. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, baik yang bersifat pengetahuan maupun sikap. Usaha pertama yang dilakukan oleh sekolah dalam pembinaan sikap yaitu melalui tata tertib sekolah. Sebagaimana diketahui dewasa ini banyak sekali siswa sekolah yang terlibat dalam kenakalan remaja, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, tawuran antar sekolah serta penggunaan etika yang salah dalam kehidupan. Oleh karena itu, melalui pembinaan tata tertib sekolah diharapkan siswa dibiasakan melaksanakan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakatnya.

Hasil kajian sementara di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat perilaku siswa yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan di lihat dari perkembangan masyarakat global karena kemajuan pengetahuan dan teknologi, khususnya para siswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan berpengaruh negatif terhadap perilaku siswa. Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

Penelitian ini terfokus pada hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, masih tingginya tingkat pelanggaran tata tertib di sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak guru BK di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, diketahui ada 105 siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa menunjukkan bahwa siswa tersebut masih kurang dapat mengaplikasikan pendapatnya tentang hak dan kewajibannya di sekolah. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah menunjukkan siswa kurang patuh terhadap peraturan sekolah. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan di sekolah sering kurang dihargai dan diperhatikan oleh siswa. Sekolah memegang peran yang sangat penting dalam menanamkan dan menumbuhkan aspek pendidikan moral. Kasus atau pelanggaran tata tertib sekolah tersebut terkait dengan karakteristik siswa seperti perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu yang dipengaruhi oleh sikap, minat, keinsyafan, pengetahuan, dan faktor lain yang mempengaruhinya. Ketaatan terhadap tata tertib sekolah adalah sebuah kesiapan yang harus ditanamkan kepada siswa di sekolah agar mempunyai sikap dan perbuatan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Pelanggaran

Setiap manusia, baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tindakan manusia dalam interaksi sosial tersebut senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tapi kenyataannya, masyarakat masih buta akan pentingnya menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya, norma itu ada untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Menurut Robert M. Z. Lawang, “penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang”. Menurut James W. Van Der Zanden, “perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi” dalam Nova Saha (<http://nenginayz.blogspot.com/>).

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah bentuk kenakalan siswa yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat.

2. Tinjauan Tentang Tata Tertib Sekolah

Menurut Instruksi Menteri Pendidikan dan kebudayaan tanggal 1 Mei 1974, No. 14/U/1974 dalam Suryosubroto (2010: 81), “Tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarnya”.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998: 37), mengemukakan bahwa: “Peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan”.

Berdasarkan pengertian pelanggaran dan tata tertib yang telah dijelaskan, maka yang dimaksud oleh peneliti tentang pelanggaran tata tertib sekolah adalah suatu penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh siswa menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat secara resmi oleh pihak sekolah yang mana di dalamnya terdapat hal-hal yang diharuskan, dilarang, dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya.

3. Tinjauan Tentang Tujuan Tata Tertib Sekolah

Menurut Hurlock (1990: 85), yaitu: “Peraturan bertujuan untuk membekali anak dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam situasi tertentu”. Tujuan tata tertib adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban, dan suasana yang damai dalam pembelajaran.

Dalam informasi tentang Wawasan Wiyatamandala dalam Dekdikbud (1993: 21), disebutkan bahwa: “Ketertiban adalah suatu kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian dan keseimbangan tata kehidupan bersama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan tujuan tata tertib sekolah yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan bahwa tata tertib sekolah bertujuan agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar.

4. Peran dan Fungsi Tata Tertib Sekolah

Tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman perilaku siswa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock (1990: 76), bahwa “Peraturan berfungsi sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai sumber motivasi untuk bertindak sebagai harapan sosial...”. Di samping itu, peraturan juga merupakan salah satu unsur disiplin untuk berperilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hurlock (1990: 84), yaitu “Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, ia harus mempunyai empat unsur pokok, apapun cara mendisiplinkan yang digunakan, yaitu peraturan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajak dan memaksakannya, hukuman untuk pelanggaran peraturan dan penghargaan untuk perilaku yang sejalan dengan perilaku yang berlaku”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan disiplin perlu adanya peraturan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Tata tertib sekolah mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu membiasakan anak mengendalikan dan mengekang perilaku yang diinginkan, seperti yang dikemukakan oleh Hurlock (1990: 85), yaitu:

- a. Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui oleh anggota kelompok tersebut. Misalnya anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat bantuan dalam tugas sekolahnya, bahwa menyerahkan tugasnya sendiri merupakan satu-satunya cara yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya.
- b. Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Agar tata tertib dapat memenuhi kedua fungsi di atas, maka peraturan atau tata tertib itu harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh individu atau siswa. Bila tata tertib diberikan dalam kata-kata yang tidak dapat dimengerti, maka tata tertib tidak berharga sebagai suatu pedoman perilaku.

Berdasarkan peran dan fungsi tata tertib sekolah yang telah dijelaskan, maka peneliti mengemukakan bahwa tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman yang mengatur seluruh perilaku warga sekolah. Sedangkan fungsi tata tertib sekolah adalah mendidik dan membina perilaku siswa di sekolah, karena tata tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu tata tertib juga berfungsi sebagai ‘pengendali’ bagi perilaku siswa, karena tata tertib

sekolah berisi larangan terhadap siswa tentang suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya.

5. Sikap Kepatuhan Siswa terhadap Tata Tertib di Sekolah

Menurut Djahiri (1985: 25), tingkat kesadaran atau kepatuhan seseorang terhadap tata tertib, meliputi:

- a. Patuh karena takut pada orang atau kekuasaan atau paksaan.
- b. Patuh karena ingin dipuji.
- c. Patuh karena kiprah umum atau masyarakat.
- d. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban.
- e. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan.
- f. Taat karena hal tersebut memang memuaskan baginya.
- g. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal.

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran seseorang khususnya siswa untuk mematuhi aturan atau hukum memang sangat penting. Selain bertujuan untuk ketertiban juga berguna untuk mengatur tata perilaku siswa agar sesuai dengan norma yang berlaku.

6. Pengertian Kemampuan

Kemampuan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk peningkatan kemampuan mengemukakan pendapat yang tepat tentang hak dan kewajiban siswa dalam rangka peningkatan ketaatan tata tertib di sekolah (Siagian, 1998: 15).

Menurut Livingstone seperti dikutip oleh Stoner (1996: 118), bahwa kemampuan itu dapat dan harus diajarkan. Karena itu dalam peningkatan mengemukakan pendapat, peranan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya (Gibson, 1996: 126).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan siswa adalah kapasitas kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam melakukan sesuatu hal atau beragam tugas dalam suatu pekerjaan tertentu.

7. Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998).

9. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab

Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Pada prinsipnya saluran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran tradisional dan saluran modern, dalam Priyanto, dkk (2008: 117).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Hak dan Kewajiban Siswa di Sekolah

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu masalah hak dan kewajiban peserta didik.

Pasal 12

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2. Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah adalah kesanggupan atau kecakapan seorang siswa dalam menyampaikan pikirannya tentang suatu hal yang dapat siswa peroleh dan siswa tersebut lakukan di lingkungan sekolah dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab.

Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan adakah hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian korelasional, karena penelitian melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, khususnya mengenai hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 20 Bandar Lampung yang melanggar tata tertib sekolah yang berjumlah 105 orang,. sampelnya dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %". Berdasarkan teori dari Arikunto S (2002: 112), maka sampel diambil 20% dari 105 siswa SMP Negeri 20 Bandar Lampung dan diperoleh sampel 21 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dokumentasi, dan teknik wawancara. Sebelum angket digunakan dilakukan uji reliabilitas. Teknik analisa data menggunakan chi kuadrat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Penyajian data hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib setelah daftar tes terkumpul dapat dilihat dalam tabel

Tabel 4.8. Distribusi frekuensi hasil angket hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di SMP N 20 Bandar Lampung

No	Kelas Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	43 – 47	Tinggi	3	14,29 %	Mampu
2	38 – 42	Sedang	14	66,67 %	Cukup Mampu
3	33 – 37	Rendah	4	19,05 %	Belum Mampu
	Jumlah		21	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket tahun 2013

Penyajian data pelanggaran tata tertib dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 4.10 Distribusi frekuensi tingkat pelanggaran tata tertib di SMP N 20 Bandar Lampung

No	Nilai	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	26-27	10	47,62 %	Ringan
2	24-25	9	42,86 %	Sedang
3	22-23	2	9,52 %	Berat
	Jumlah	21	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket tahun 2013

b. Pembahasan

Setelah hasil angket tentang hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah (variabel X) dengan empat indikator, diperoleh data dengan skor tertinggi adalah 47 dan skor terendah adalah 33, sedangkan kategorinya adalah 3 dari sebaran angket tentang hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan 16 item pertanyaan.

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah (variabel X) di SMP N 20 Bandar Lampung adalah dari 21 responden, 4 responden (19,05%) menyatakan kategori belum/tidak mampu, ini disebabkan karena sebagian dari siswa belum atau tidak memahami, menyadari, dan bertanggungjawab dengan hak dan kewajibannya di sekolah serta mereka belum berani mengemukakan pendapatnya. Kemudian 14 responden (66,67%) menyatakan kategori kurang/cukup mampu. Hal ini disebabkan karena memang siswa sudah cukup memahami, menyadari, dan bertanggungjawab dengan hak dan kewajibannya di sekolah serta mereka cukup berani mengemukakan pendapatnya. Dan selebihnya yaitu 3 responden (14,29%) menyatakan kategori mampu. Siswa sudah mampu memahami, menyadari, dan bertanggungjawab dengan hak dan kewajibannya di sekolah serta mereka sudah berani mengemukakan pendapatnya. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka Hubungan Kemampuan Mengemukakan Pendapat tentang Hak dan Kewajiban Siswa di SMP N 20 Bandar Lampung, masuk ke dalam kategori cukup mampu.

Setelah hasil angket tentang pelanggaran tata tertib (variabel Y) diketahui, diperoleh data dengan skor tertinggi adalah 27 dan skor terendah adalah 22, sedangkan kategorinya adalah 3 dari sebaran angket tentang pelanggaran tata tertib dengan 9 item pertanyaan. Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pelanggaran tata tertib (variabel Y) data yang diperoleh adalah sebagai berikut: dari 21 responden, 2 responden (9,52%) menyatakan kategori tingkat pelanggaran berat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kehendak dari siswanya sendiri dan kurang tegasnya peraturan di sekolah. Kemudian 9 responden (42,86%) menyatakan kategori tingkat pelanggaran sedang, hal ini diantaranya dapat dilihat dari beberapa siswa yang sudah cukup memahami peraturan dan mengaplikasikan peraturan tersebut di lingkungan sekolah. Dan selebihnya yaitu 10 responden (47,62%) menyatakan kategori ringan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa siswa yang sudah dapat memahami peraturan dan mengaplikasikan peraturan tersebut di lingkungan sekolah.

Dengan hasil perhitungan ini, maka tingkat pelanggaran tata tertib siswa di SMP N 20 Bandar Lampung, masuk ke dalam kategori ringan, dengan persentase sebesar 47,62%.

Berdasarkan hasil pengujian hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Ini dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menggunakan rumus Chi Kuadrat bahwa x^2 hitung lebih besar dari x^2 tabel (x^2 hitung $\geq x^2$ tabel), yaitu $35,64 \geq 9,45$ pada taraf signifikan 5 % (0,05) dan derajat kebebasan = 4, serta mempunyai derajat keeratan pengaruh antar variabel dalam kategori berperan dengan koefisien kontingensi $C = 0,79$ dan koefisien kontingensi maksimum $C_{maks} = 0,816$. Berdasarkan perbandingan antara nilai C dengan C_{maks} , maka hasilnya adalah 0,79, yang berada pada kategori tinggi. Sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan hasil penelitian khususnya analisis data seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Ada hubungan yang signifikan, artinya adanya kepercayaan atau keyakinan, tegasnya yakin benar-benar berkorelasi atau berhubungan, bahwa variabel X berhubungan dengan variabel Y, yaitu kemampuan mengemukakan pendapat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah berhubungan dengan pelanggaran tata tertib di SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mengemukakan pendapat

tentang hak dan kewajiban siswa, berdasarkan hasil penelitian memiliki pemahaman yang cukup paham, kesadaran siswa terbilang cukup baik, tanggungjawab siswa terbilang sangat paham, dan keberanian siswa terbilang kurang berani. Sedangkan, pelanggaran tata tertib sekolah, berdasarkan hasil penelitian memiliki sikap mental yang sangat baik, pemahaman siswa mengenai siste aturan , perilaku, norma, dan kriteria terbilang cukup paham, serta sikap dan kelakuan yang menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati tata tertib terbilang sangat baik.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada sekolah berkewajiban untuk memberikan dan melindungi hak siswa di sekolah, oleh karena itu pemberian dan perlindungan hak kepada siswa agar dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu membantu siswa untuk menyalurkan bakat, minat, dan kemampuannya melalui proses dan fasilitas belajar. Selain itu, sekolah juga dapat mempertegas peraturan-peraturan di sekolah agar dapat mengurangi pelanggaran tata tertib dan dapat memberikan sanksi sewajarnya kepada siswa yang melanggar peraturan tersebut.
2. Kepada guru, hendaknya dapat dan mampu memilih strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk bisa lebih banyak membantu siswa meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat khususnya tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah, selain itu guru juga dapat memberikan contoh cara menggunakan hak tersebut dengan benar dan melaksanakan kewajiban dengan bertanggungjawab.
3. Kepada siswa-siswi SMP N 20 Bandar Lampung lebih dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengemukakan pendapat khususnya tentang hak dan kewajibannya di sekolah dengan cara memahami, menyadari, dan bertanggungjawab dengan hak dan kewajibannya di sekolah. Harapannya siswa tidak hanya mampu mengemukakan pendapat, tetapi juga mampu mengaplikasikan hak dan kewajibannya di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Panduan Manajemen Sekolah*. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Depdikbud. 1993. *Wawasan Wiyatamandala*. Depdikbud.
- Gibson, J.L. et. al. 1996. *Organisasi dan Manajemen*. Erlangga. Terjemahan. Jakarta.
- Hurlock, Elizabeth B. 1990. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Erlangga. Jakarta.
- Kosasih Djahiri, Achmad. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Granesia. Bandung.
- Priyanto, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Saha, Nova. 2012. *Makalah Pelanggaran terhadap Norma-Norma di Dalam Masyarakat*. <http://nenginayz.blogspot.com/>. Diakses tanggal 24 Januari 2013.
- Siagian, S.P. 1993. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Perspektif Kultur dan Struktur*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sistem Pendidikan Nasional. 2010. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003*. Citra Umbara. Bandung.
- Stoner, J.A.F. 1980. *Efektivitas Organisasi, PPM*. Erlangga, Terjemahan. Jakarta.
- Suryosubroto, B. 2010. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Identitas Jurnal Pendidikan:

Nama : Novita Hariyani
NPM : 0913032060
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Pembimbing I : Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.
Pembimbing II : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
Pembahas Seminar Hasil : Drs. Holillulloh, M.Si.